

# Jejak Dakwah Kiai Sebagai Creator Dalam Dinamika Perubahan Sosial

## Traces of Kiai's Islamic Da'wah as Creators in the Dynamics of Social Change

**Rojabi Azharghany**

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia  
azharghany@unuja.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze the traces of the role of da'wah dakwah kiai as a creator agent in facing social changes in society. The discussion is by conducting a study on the results of scholarly research written since 1974 until now, by highlighting that kiai not only mediates in changes in society, or even stagnates in change. More than that, kiai appears as an active agent in creating to get out of various problems faced by both himself, pesantren and the community. For this purpose, the social history method was chosen in this study by analyzing the study of thoughts about kiai conducted by previous scholars by prioritizing the social background in the history of da'wah kiai as a creator in social change, as well as containing critical aspects to analyze the role of da'wah kiai as a creator of the dynamics of social change. This study was conducted by reconstructing social events involving traditionalist kiai on the stage of social change history from 1974 to the present. First, the terminology of cultural brokers is refuted by the fact that kiai as creators. Second, kiai modernize traditions. Third, politics and community empowerment are played by kiai to realize rahmatan lil alamin and the benefit of the people. Fourth, kiai transforms thinking to realize a moderate society. Fifth, kiai as patrons have a strong role in guiding the people. Sixth, kiai as a decision maker realizes the welfare and benefit of the people. Seventh, the dynamics of kiai da'wah in social power change reveals the flexibility of the role of kiai da'wah when dealing with other powers. Eighth, kiai is able to act as an influencer who educates people in the digital era with acceptance for all old people and millennials.*

**Keywords:** dakwah kiai, creator, social change, social history

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejak peran dakwah dakwah kiai sebagai agen creator dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Pembahasannya dengan melakukan kajian pada hasil penelitian cendekiawan yang ditulis sejak tahun 1974 hingga sekarang, dengan menyorot kiai tidak hanya memediasi dalam*

perubahan masyarakat, atau bahkan mengalami stagnasi dalam perubahan. Lebih dari itu, kiai muncul sebagai agen yang aktif dalam melakukan kreasi untuk keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi baik oleh dirinya, pesantren maupun masyarakat. Untuk tujuan tersebut, metode sejarah sosial dipilih dalam penelitian ini dengan menganalisis kajian pemikiran tentang kiai yang dilakukan oleh para cendekiawan terdahulu dengan mengedepankan latarbelakang sosial dalam sejarah dakwah kiai sebagai creator dalam perubahan sosial, sekaligus memuat aspek kritis untuk menganalisis peran dakwah kiai sebagai creator dinamika perubahan sosial. Kajian ini dilakukan dengan merekonstruksi peristiwa-peristiwa sosial yang melibatkan para kiai tradisional di panggung sejarah perubahan sosial sejak tahun 1974 sampai saat ini. Hasilnya Pertama, Terminologi cultural broker terbantahkan dengan fakta kiai sebagai creator. Kedua, kiai melakukan modernisasi tradisi. Ketiga, politik dan pemberdayaan masyarakat diperankan oleh kiai untuk mewujudkan rahmatan lil alamin dan kemaslahatan umat. Keempat, kiai melakukan transformasi pemikiran untuk mewujudkan masyarakat yang moderat. Kelima, kiai sebagai patron memiliki andil yang kuat dalam rangka membimbing umat. Keenam, kiai sebagai decision maker mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Ketujuh, dinamika dakwah kiai dalam perubahan sosial kekuasaan mengungkap fleksibilitas peran dakwah kiai ketika berhadapan dengan kekuasaan lainnya. Kedelapan, kiai mampu memerankan sebagai influencer yang mencerdaskan umat di era digital dengan penerimaan pada semua kalangan tua maupun generasi milenial.

**Kata Kunci:** dakwah kiai, creator, perubahan sosial, sejarah sosial

## **Pendahuluan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejak peran dakwah kiai sebagai agen creator dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Pembahasannya dengan melakukan kajian pada hasil penelitian cendekiawan yang ditulis sejak tahun 1974 hingga sekarang, dengan menyorot kiai tidak hanya memediasi dalam perubahan masyarakat, atau bahkan mengalami stagnasi dalam perubahan. Lebih dari itu, kiai muncul sebagai agen yang aktif dalam melakukan kreasi untuk keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi baik oleh dirinya, pesantren maupun masyarakat.

Sejak periode peralihan kerajaan Hindu-Budha menuju kerajaan Islam sampai kepada era reformasi di Indonesia, keberadaan kiai tampil sebagai elit agama yang mendapatkan kedudukan terhormat di masyarakat disertai dengan otorisasi kekuasaan dengan berbagai penyesuaiannya. Ricklefs (2012) mendefinisikan elit agama adalah mereka yang didefinisikan, dilegitimasi, dan diilhami oleh kedudukan keagamaan mereka. Mereka—khususnya di Indonesia—adalah para ulama terpelajar dari agama yang sedemikian diakui oleh komunitas mereka (Ricklefs 2012:18).

Peralihan kekuasaan Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia menjadi Kerajaan Islam menempatkan sosok kiai—namun lebih dikenal saat itu sebagai syekh atau sayyid—pada lingkaran utama tahta kerajaan. Di masa itu, kebanyakan syekh menjadi qodli (hakim) dan pemuka agama yang sah ditunjuk oleh raja. Sebut saja misalnya kehadiran dua saudara di tanah Jawa pada periode terakhir kerajaan Majapahit, yakni Syekh Ali murtadlo dan Syekh Ali Rahmat sebagai pemuka agama (raja pendeta) dan imam agama (Azra 2004:). Selang beberapa tahun kemudian semakin banyak syekh/sayyid/ ulama atau kiai yang menduduki posisi penting dalam kerajaan Islam, seperti Nuruddin Ar Raniri (w. 1658), Abdur Rauf As Singkili (w. 1693) dan Muhammad Yusuf Al Maqassari (w. 1699). Para syekh yang terakhir ini masuk pada pusaran kekuasaan kerajaan diperiodesasikan sebagai pra kolonial (Burhanudin 2012:31).

Perubahan pola peran dakwah kiai di masyarakat selanjutnya terjadi pada periode kolonial. Penguasaan VOC sebagai raja dagang di Nusantara menggeser peran dakwah kiai dilingkaran kerajaan

bersamaan dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam. Periode ini menempatkan kiai jauh diluar struktur kekuasaan formal pemerintah dan beralih di pelosok-pelosok pedalaman. Pengalaman ini dimanfaatkan oleh kiai untuk memperkuat otoritas sebagai pimpinan agama secara langsung kepada masyarakat dengan mendirikan pesantren (Burhanudin 2012:11). Status elit kiai sebagai pemimpin lembaga keagamaan mengakar di masyarakat dengan simbol-simbol kiai yang kharismatik, namun bersamaan dengan itu, pemerintah hindia belanda membentuk satu otoritas Agama Islam bernama kiai penghulu (Isma'il, 1997). Hal ini membuat para kiai semakin mengencangkan kekuasaannya dengan membentuk komunitas dan gerakan sosial seperti yang dilakukan Kiai Diponegoro, Kiai Nawawi Banten, Kiai Mahfudz Termas, Kiai Kholil Bangkalan dan Kiai Soleh Darat (Burhanudin, 2012). Peran dakwah kiai itu terutama muncul dalam bentuk jaringan ulama Nusantara dan ulama Makkah sekaligus Hadrami.

Kurun diakhir periode kolonial ditandai dengan pembentukan lembaga yang lebih luas dan lebih besar sebagai wadah legitimasi otoritas keagamaan, seperti NU (Nahdlatul Ulama). Hal ini dilakukan atas dasar respon gerakan modernisasi yang dilakukan oleh Belanda dan munculnya gerakan reformis Islam (Burhanudin 2012:383). Keadaan ini dirasakan mengganggu otoritas para kiai sebagai ahli agama yang selama ini telah hidup berdampingan bersama masyarakat, khususnya di daerah pedalaman. Dengan demikian, peran dakwah kiai tidak hanya meliputi pada komunitas santri saja, lebih dari itu berupaya untuk masuk pada kalangan luas masyarakat Indonesia.

Pentingnya peran dakwah kiai dalam perubahan sosial menarik sejumlah penulis. Mansurnoor, misalnya, dalam penelitiannya di Madura, menandakan pentingnya posisi kiai dan membuat hubungan antara kiai dan *rato* (penguasa Madura lama) dengan menguraikan merosotnya pengaruh *rato* sebagai penyebab langsung munculnya peran dakwah dan kedudukan elit sosial kiai (Mansurnoor 1995). Touwen-Bouwisma menelusuri proses historis yang mengarah ke perkembangan ulama dan organisasinya di Madura, yang sampai sekarang telah membentuk penyeimbang terhadap intervensi negara. Dia berargumen bahwa posisi sosial ulama Madura yang kuat saat ini terikat erat dengan proses pembentukan negara dan islamisasi masyarakat Madura (Touwen-Bouwisma, 1992). Dalam menjelaskan fenomena kiai, Mansurnoor menyatakan kiai harus dipandang sebagai sebuah institusi, dalam arti sekumpulan atribut. Ini terdiri dari posisi sebagai pribadi dan hubungan dengan seperan dakwahgkat karakteristik yang sangat diperlukan seperti latar belakang keluarga, sumber daya, pusat keagamaan, dan jaringan pengikut (Mansurnoor 1990:238).

Masih dengan latar penelitian di Madura, Pribadi (2018) menemukan secara umum diakui kiai di Madura saat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Kiai dipandang sebagai orang yang memiliki luas pengetahuan tentang Islam, dan yang kemampuannya dalam bidang agama melampaui dari rakyat biasa. Mereka dihormati sebagai sumber yang paling otoritatif dalam kekuasaan Islam. Penghargaan tinggi di mana publik mempercayakan pada kiai, menempatkan kiai sebagai tokoh utama dan pemimpin rakyat, posisi yang sebagian besar telah dicapai setidaknya sejak awal abad kesembilan belas ketika bangsawan lokal secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Sebagian besar di desa maupun kecamatan bahwa kekuatan besar dakwah kiai telah diperhitungkan, tidak hanya oleh penduduk desa tetapi juga juga oleh pejabat negara. Pihak yang berkuasa, di satu sisi, telah memperebutkan kiai, dan di sisi lain, mereka juga menikmati manfaat kepemimpinan kiai diantara orang-orang. Tanpa dukungan kiai, yang ada adalah kemungkinan kecil untuk melibatkan penduduk desa dalam implementasi pembangunan program selama era Orde Baru. Kedua otoritas tersebut; negara dan *kiai* tentunya sadar akan situasi tersebut (Pribadi 2018:64).

Apa yang harus kita ingat adalah bahwa sebagai elit agama, kiai mampu merangkul, menantang, dan mengubah ideologi dan kebijakan yang dipaksakan; inilah yang secara umum orang tidak banyak mampu. Mengingat perkembangan sosial-politik ini, kita telah melihat pentingnya

kiai sebagai aktor sentral dalam politik lokal di Indonesia dan mencerminkan pentingnya ulama sebagai aktor utama dalam politik Muslim di mayoritas wilayah Muslim lainnya. Di banyak tempat, mereka menegaskan hak mereka untuk hidup dan menentang setiap tindakan paksaan dari suatu negara yang akan meniadakan sumber daya dan otoritas mereka (Hall and Held 1989:175).

Kebanyakan kajian tentang peran dakwah aktif kiai agaknya seputar pergulatannya dalam menghadapi arus kekuasaan, politik dan negara. Namun tidak sedikit juga kajian peran dakwah aktif kiai dalam mengawal perubahan tradisi, budaya, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan sebagai *creator* dalam membentuk jaringan intelektual. Dalam kajian tradisi dan budaya misalnya dilakukan oleh Abdurrahman Wahid (1974), Horikoshi (1987[1976]) Dhofier (1980); dalam pendidikan yang berbasis pemberdayaan masyarakat Ziemek (1983); dalam pendidikan Lukens-bull (2000) Jackson and Parker (2008) Bruinessen (2012); dalam penyebaran faham keagamaan Haidar (1994) Djamil (2001); dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi (Buresh, 2002); dan dalam peran dakwah jaringan intelektual Mas'ud (2004), Azra (2004), Burhanudin (2012). Selain bidang tersebut, cendekiawan yang mengkaji peran dakwah aktif kiai pada bidang kekuasaan, politik dan negara juga akan dibahas. Kajian para cendekiawan tersebut tersebut akan dibahas pada sub bab berikutnya untuk menggambarkan peran aktif kiai sebagai *creator* dalam berbagai bidang.

Metode sejarah sosial dipilih dalam penelitian ini, digunakan sebagai pendekatan isu penelitian. Metode ini oleh Ferdinand Broudel disebut sebagai sejarah struktural (Kinser, 1981). Pendapatnya menyatakan bahwa manusia sebagai pendukung sejarah berada dalam struktur yang ada dalam aspek kehidupan manusia. Metode ini mengembangkan corak penulisan sejarah dan analisisnya terhadap fenomena-fenomena sejarah dengan menggunakan pendekatan struktural. Prinsip yang dijadikan titik berangkat dalam metode penelitian sejarah struktural adalah dengan menjawab enam pertanyaan utama dalam sejarah. Pertanyaan tersebut adalah *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana), yang ditujukan pada fakta peristiwa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditelusuri melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Penelitian para cendekiawan yang menampilkan sorotan terhadap jejak dakwah kiai menjadi objek kajian penelitian ini. Analisis kajian pemikiran tentang kiai yang dilakukan oleh para cendekiawan terdahulu dengan mengedepankan latarbelakang sosial dalam sejarah dakwah kiai sebagai *creator* dalam perubahan sosial, sekaligus memuat aspek kritis untuk menganalisis peran dakwah kiai sebagai *creator* dinamika perubahan sosial. Kajian ini dilakukan dengan merekonstruksi peristiwa-peristiwa sosial yang melibatkan para kiai tradisional di panggung sejarah perubahan sosial sejak tahun 1974 sampai saat ini. Dalam kerangka mencapai tujuan penelitian, maka dalam kajian ini ditempuh cara sebagai berikut: Pengumpulan Sumber (Heuristik). Pada tahapan ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber- sumber literatur yang diteliti, baik berupa sumber primer yang berkaitan dengan jejak dakwah kiai sebagai *creator* perubahan sosial di Indonesia, maupun sumber skunder yang berkaitan dengan interpretasi atas interaksi sosial yang dilakukan oleh kiai. Verifikasi dan validasi (Kritik Sumber dan Keabsahan Sumber). Dalam setiap peristiwa setidaknya dilakukan perbandingan terhadap tiga sumber literatur untuk menjamin otentisitas, orisinalitas dan integritas sumber. Interpretasi (Analisis dan Sintesis). Dimaksudkan menyatukan beberapa data yang ada, dan dikelompokkan menjadi satu dengan generalisasi konseptual. Dalam prosesnya, secara objektif data peristiwa politik Islam kiai dianalisis melalui interpretasi terhadap simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi politik Islam kiai. Interpretasi yang dilakukan dengan menggunakan sumber literatur yang telah diverifikasi dan divalidasi. Penyajian data. Model yang digunakan secara deskriptif merekonstruksi dakwah kiai sebagai *creator* perubahan sosial di Indonesia.

## Kiai dan Pesantren

Kiai melalui kepemimpinannya yang kharismatik berhasil menciptakan institusi pesantren sebagai subkultur. Konsep subkultur itu diangkat oleh Abdurrahman Wahid dengan argumennya bahwa di dalam pesantren telah terbentuk keunikan dalam aspek-aspek yang meliputi: cara hidup yang dianut, pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti, serta hirarki kekuasaan intern tersendiri yang ditaati sepenuhnya. Cara hidup yang dianut berdasarkan pada nilai-nilai yang diteladankan oleh kiai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga keteladanan kiai tersebut tercermin menjadi tata nilai yang melembaga dalam kehidupan pesantren. Tata nilai itu seperti keikhlasan, dalam arti ketulusan dalam menerima, memberikan dan melakukan sesuatu diantara sesama makhluknya. Termasuk juga dalam tata nilai ini adalah menerima terhadap segalanya dengan kadar apapun yang diberikan oleh kehidupan, terutama jika dipandang dari segi pendapatan materil dengan tetap memperhatikan niat yang berlandaskan tujuan *ukhrawi*. Pandangan hidup semacam ini dapat melahirkan penerimaan terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan dengan mudah serta fleksibilitas para santri untuk menempuh jenjang apapun yang menjadi tuntutan masyarakat kelak. Inilah satu nilai yang dikreasikan oleh kiai untuk membentuk jiwa dinamis-adaptif pada santrinya (Wahid 1974:42-43).

Secara hirarki kekuasaan, kiai membuat hubungan dengan para pembantunya ditegakkan dalam kewibawaan moral. Hirarki internal ini, sama sekali berbeda dengan kehidupan di luarnya. Dalam hal-hal yang paling sederhana pun, hirarki kekuasaan ini tidak akan berbagi dengan dunia luarnya. Inilah hirarki kekuasaan absolut. Demikian besar kekuasaan kiai kepada para santrinya, sehingga santri dalam seumur hidupnya akan selalu merasa terikat dengan kiaiinya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai panduan moral dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seorang santri biasanya akan meminta pertimbangan kiaiinya dalam persoalan melanjutkan pendidikan, memilih jodoh dan memilih pekerjaan (Wahid 1974:43).

Singkatnya, kemampuan pesantren dalam menjalankan pola kehidupan yang unik tidak terlepas dari peran dakwah kreaif kiai dalam mengawal perjalanan tradisi pesantren. Kemampuan pesantren bertahan selama berabad-abad bahkan melampaui masyarakat di sekitarnya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya. Sebuah contoh dapat ditunjukkan oleh Kiai Hasyim Asyari yang hidup melakukan transformasi kehidupan masyarakat sekitar Tebuireng, Jombang. Masyarakat pedusunan itu pada mulanya adalah sebuah masyarakat yang hidup dalam serba-serbi keduniawian yang didukung dengan fasilitas yang cukup menjanjikan dengan adanya Pabrik Gula Cukir. Realitas ini berhadapan dengan nilai hidup masyarakat Jawa lama yang berorientasi pada harmoni dengan Sang Pencipta dalam suatu kehidupan yang serba beragama. Proses akulturasi hasil perbenturan ini menciptakan masyarakat yang secara budaya berwatak rawan: hilangnya rasa aman perorangan dari gangguan “orang-orang jago” dan meluasnya relativitas moral. Hadirnya Kiai Hasyim di tempat ini dengan mendirikan pesantren, pada mulanya mendapat tantangan keras dari masyarakat sekitar, tetapi lambat laun pola kehidupan keberagamaan kembali menemukan medannya untuk membentuk masyarakat yang memegang nilai-nilai moral kehidupan. Transformasi masyarakat yang dilakukan Kiai Hasyim bersama para santri terjadi bersamaan dengan dan menjadi sarana bagi perkembangan Pesantren Tebuireng. Hingga akhirnya pesantren mendapatkan kedudukan kultural yang relatif lebih kuat dibanding dengan unsur lain dalam masyarakat (Wahid 1974:43-44).

### **Kiai Sebagai *Creator*; Menolak Lebel *Cultural Broker***

Peran dakwah kreatif kiai dalam arus perubahan sosio-kultur juga dibahas dalam penelitian (Horikoshi 1987[1976]). Pendapatnya tentang peran dakwah kiai menolak terhadap konsep *cultural broker* yang disampaikan oleh (Geertz, 1960). Baginya Geertz sangat keliru jika peran dakwah kiai hanya

di sempitkan pada tingkat memediasi saja yang cenderung tidak memiliki peran dakwah yang signifikan di tengah masyarakat. bahkan Geertz beranggapan secara politis kiai yang tidak berpengalaman dan memiliki keahlian tidak akan mampu memimpin dengan baik hubungan masyarakat-bangsa modern. Data etnografi yang didapatkan Horikoshi di Jawa Barat menampilkan kesimpulan yang sama sekali berbeda dengan Geertz (Horikoshi 1987[1976]:237).

Horikoshi menampilkan kesimpulannya tentang peran dakwah kiai yang lebih kreatif dan berdaya signifikansi di kalangan sosio-kultur masyarakatnya dalam dua hal. *Pertama*, berbeda dengan anggapan Geertz bahwa para kiai di Jawa Barat cenderung menolak terhadap perubahan untuk mempertahankan kedudukan yang sangat berpengaruh dalam sistem yang tradisional. *Kedua*, para kiai telah mengatasi dengan cermat terkait masalah-masalah yang menyangkut hubungan masyarakat-bangsa, sebab kekuasaan mereka sama sekali tidak mendukung terhadap fungsi mediasi yang inginkan oleh kekuasaan di luar mereka. Lebih jauh, kepemimpinan para kiai yang kharismatik dan berpengaruh telah membentuk lebih banyak lagi gambaran kebersamaan umat Islam yang lebih besar. Model-model patronase dalam kepemimpinannya mereka semuanya berasal dari kesungguhan mereka untuk melestarikan masyarakat Islam yang komprehensif bertentangan dengan keinginan nasional yang asing dan skuler. Dalam melestarikan tradisi Islam bagi generasi penerus dan memajukan dakwah, para kiai telah memiliki mekanisme pewarisan khusus melalui keluarga dan bahkan sebagai jaringan fungsionaris, mereka telah memiliki jaringan tersendiri dan terorganisir diantara mereka yang lebih luas secara wilayah geografis (Horikoshi 1987[1976]:238).

Tidak seperti *cultural broker* yang nampak tidak ada signifikansinya di kalangan masyarakat dan kekuatannya cenderung berpihak pada sistem nasional, posisi para pemimpin tradisional telah melembaga dan tertanam secara kuat dalam struktur masyarakat lokal. Bagi masyarakat Islam di pedesaan Jawa, pemimpin tradisional haruslah mereka yang mampu menunjukkan kemampuannya dengan mewujudkan harapan-harap masyarakat dan penduduk desa, memperhatikan kesejahteraan sosial ekonomi dan juga tujuan-tujuan agama mereka. Kemahiran para kiai dalam menggunakan simbol agama dan ideologi, merupakan sisi yang menunjukkan kesadaran mereka terhadap prinsip agar otoritas mereka dapat dipertahankan. Sejauh peran dakwah mereka dalam memperkenalkan urusan-urusan dari luar yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat, para kiai desa melaksanakan dengan berbagai cara. Diantara yang mereka lakukan adaah dengan memanipulasi secara cerdik terhadap kepentingan-kepentingan nasional, bantuan-bantuan yang mengarahkan agar penduduk desa dapat ikut berdagang di perkotaan dan usaha proyek dalam memodernisasi pendidikan tradisional yang ada di pesantren-pesantren. Tidak jarang mereka menutup saluran komunikasi dan dorongan perubahan serta menahan informasi dengan tujuan mencegah perkembangan hubungan langsung antara dua tujuan yang berbeda sekaligus untuk menghindari hal-hal yang membahayakan terhadap kedudukan mereka (Horikoshi 1987[1976]:241-42). Sederhananya adalah bahwa dalam menanggapi perubahan sosio-kultur, kiai memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaga dan melestarikan sistem sosial yang sudah mapan di masyarakatnya untuk menghindari goncangan budaya yang dapat membahayakan orientasi masyarakat disamping dapat membahayakan kedudukan kekuasaan mereka sebagai kontrol sosial.

### **Modernisasi Tradisi**

Jika horikoshi menampilkan kreatifitas kiai dalam menghadapi arus perubahan sosial dengan mekanisme penolakan dan manipulasi cerdik, maka Dhofier (1980) menampilkan bagaimana kreasi kiai melakukan modernisasi dengan caranya tetap menjaga terhadap tradisi. berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di dua pesantren Jawa - Pesantren Tegalsari di Salatiga, Jawa Tengah, dan Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur tentang pembangunan berbasis pesantren bahwa

meskipun kiai sangat terkait dengan pola pikir Islam tradisional, mereka telah mengambil peran dakwah kepemimpinan dalam beradaptasi dengan modernisasi dalam melakukan perubahan sosial. Bukan hanya di situ saja, para kiai juga membuat modernisasi yang berbeda sama sekali dengan modernisasi barat, mereka menampilkan modernisasi baru dengan corak Islami (Jackson and Parker 2008:37)

Menurut Dhofier, para kiai yang menjadi penghubung antara tradisi Islam dengan tuntutan dunia modern yang cenderung duniawi. Inilah perkembangan kehidupan yang harus mereka hadapi. Kedudukan ganda kiai ini memang unik, dan menjadi inti dari kualitasnya yang menonjol.

“Memang benar, kedudukan ganda ini pula yang seringkali menjadi sumber tragedi yang seringkali dialami oleh para kiai; tetapi justru pada kedudukan ganda ini pula terletak keagungan mereka. Kita boleh saja menyimpulkan bahwa kedudukan ganda ini menyulitkan kiai sebagai pemimpin pesantren; tetapi kita bisa juga menyimpulkan bahwa para kiai tersebut adalah pemimpin-pemimpin yang kreatif yang selalu berhasil mengembangkan pesantren dalam dimensi-dimensi yang bar; dan panorama yang berwajah sangat majemuk dari kehidupan pesantren sekarang ini, adalah merupakan petunjuk adanya kreasi yang jenius dari para kiai (Dhofier 1980:177).

Mekanisme lain yang diciptakan oleh para kiai dalam menjaga kualitas keilmuan dan tradisi adalah hubungan kekerabatan antar kiai. Ini adalah salah sistem dalam melestarikan tradisi pesantren, yakni membangun solidaritas dan kerjasama sekuat-kuatnya antar sesama kiai. Dengan cara ini, punahnya pesantren lama dapat diatasi dengan munculnya pesantren baru dengan warisan kultur dan keilmuan yang geneologis (Dhofier 1980:61-62).

Scott Allen Buresh (2002) melengkapi kajian peran dakwah penting kiai dalam membangun tradisi Islam yang bercorak modern. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di dua pesantren di Jawa Barat—di Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Pesantren Raudlatut Tholibin di Cirebon dan Pesantren Pertanian Darul Fallah di Bogor tentang pembangunan berbasis pesantren bahwa meskipun kiai sangat terkait dengan pola pikir Islam tradisional, mereka telah mengambil peran dakwah kepemimpinan dalam beradaptasi dengan modernisasi dalam melakukan perubahan sosial. Bahkan para kiai juga membuat modernisasi yang berbeda sama sekali dengan modernisasi barat, mereka menampilkan modernisasi baru dengan corak Islami.

### **Politik dan Pemberdayaan Masyarakat**

Peneliti lain yang memfokuskan pada peran dakwah kiai melalui pesantren dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Ziemek (1983). Dalam penelitiannya terdapat temuan bahwa para kiai yang terkoordinasi dalam Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) melaksanakan fungsi sosialnya dalam pemberdayaan masyarakat. Maka pada pesantren-pesantren yang besar dan pada regional yang penting, kiai membentuk badan yang disebut dengan “Biro Pengembangan” dan sekaligus merupakan basis kegiatan para TPM (Tenaga Pengembang Masyarakat). Di sinilah dilakukan pengerjaan konseptual dan organisatoris untuk pelaksanaan program pengembangan desa. Disini para kiai juga bekerjasama dengan wakil-wakil dari lembaga-lembaga non agama (LP3ES, LSP dan sebagainya) sebagai sponsor (Ziemek 1983:248). Dengan demikian, semakin nyata peran dakwah para kiai dalam melakukan kreasi-kreasi khusus dalam hal ini kaitannya dengan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para kiai tidak lah cukup jika hanya menjadi mediator. Hal sangat dibutuhkan adalah kemampuan dalam mengkreasi program-program bersama masyarakat secara partisipatoris.

“Dapat di duga bahwa usaha reform ini akan mempunyai dampak terhadap perkembangan kebijaksanaan di bidang kemasyarakatan, dengan dihadapkannya alternatif-alternatif yang

berorientasi pada masyarakat kepada konsep-konsep pendidikan pemerintah di bidang pendidikan.” (Ziemek 1983:248)

Peran dakwah politik kiai mendapat sorotan dari K. D. Jackson (1990). Penelitiannya berkaitan dengan fungsi tokoh masyarakat atau kewibawaan tradisional seorang tokoh—salah satunya adalah kiai—dalam mendinamisasi aktifitas sosial politik masyarakat, dimana keikutsertaan masyarakat dalam politik disebabkan oleh pengaruh dan arahan dari para tokoh tradisional yang senantiasa di patuhi oleh orang-orang Sunda. Peran dakwaan tokoh tradisional sangatlah besar dalam mempengaruhi masyarakat Sunda dalam melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap kekuatan yang melawan tradisi. Kekuatan hubungan kewibawaan tokoh tradisional dengan kepatuhan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang politik sesuai dengan pilihan politik yang di tentukan oleh tokoh tradisional mereka. Para tokoh ini sangat menentukan corak kehidupan dan pola hubungan masyarakat. di sisi lain ada kelompok masyarakat kebanyakan baik dari golongan tua maupun golongan muda yang menduduki posisi dalam strata sosial sebagai kelas menengah ke bawah yang lebih rendah dan tersubordinasi. Afiliasi pilihan politik kelompok inferior ini sangat ditentukan oleh kelas superior. Ikatan-ikatan sosial yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan arahan dan pengalihan dari tokoh kewibawaan tradisional (Jackson 1990:199-219).

Kajian tentang peran dakwah kiai sebagai orang yang berpengaruh dalam penentuan jaringan kekuasaan di desa dilakukan oleh Suprpto (1997). Baginya dalam penelitiannya di Kelurahan Pagentan Singosari Malang menemukan gambaran bahwa posisi kiai belum terkalahkan oleh posisi para birokrat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih kental dengan tradisi suwara dan minta restu kepada elit agama oleh kalangan birokrat pemerintah menggambarkan betapa kokohnya posisi elit agama di wilayah penelitian tersebut.

Kajian yang lebih beragam tentang peran dakwah penting kiai sebagai tokoh sentral dilakukan oleh Dirdjosanjoto (1999 [1994]). Dia mengkaji bagaimana efektifitas peran dakwah kiai dalam perubahan sosial, politik, budaya dan ekonomi di Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah dari tahun 1980-1989. Dalam perjalanan sejarah di Tayu mencatat keterlibatan kiai-kiai dalam gerakan lokal. Respon aktif dilakukan oleh kiai-kiai dalam realitas perubahan sosial. Para kiai mampu bertahan dalam situasi yang sangat kompleks. Sebagian dari mereka bahkan bergerak secara turun temurun dalam perjuangan melalui madrasah, pesantren, tarekat, ataupun pada gerakan sosial, ekonomi, politik lainnya yang ada di daerah Tayu. Dalam hal ini mereka memainkan peran dakwah penting dalam membentengi tradisi Sunni dari berbagai pengaruh luar yang mengancam, baik dari perkembangan sekolah-sekolah umum, pengaruh politik kolonial, perkembangan agama Kristen, dan bahkan juga dari pengaruh gerakan pembaharu Muhammadiyah yang datang dari kota. Singkatnya, penemuan Dirdjosanjoto menggambarkan kiai sebagai elit agama sekaligus elit politik yang memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat. kiai adalah entrepreneur politik (Dirdjosanjoto 1999 [1994]:274-281).

### **Transformasi Pemikiran**

Abdurrahman Mas'ud (Mas'ud 2006[1993]) menyusun disertasi tentang pemikiran dan kiprah ulama pesantren. Mas'ud memfokuskan penelitiannya tentang tokoh-tokoh pesantren yang ada di Indonesia. Ada lima tokoh yang dipilihnya sebagai kiai yang memiliki peran dakwah dalam pembentukan jaringan intelektual pesantren sehingga bahkan menciptakan geneologi pemikiran pesantren. Lima tokoh tersebut adalah Syekh Nawawi Bantani, Kiai Mahfudz Tarmizi, Kiai Kholil Bangkalan, Kiai Asnawi Kudus, dan Kiai Hasyim Asyari Jombang. Dalam kesimpulannya, lima tokoh ini dipandang sebagai arsitek pesantren. Dua tokoh pertama sebagai arsitek intelektual, sedangkan tiga tokoh berikutnya sebagai arsitek pengembangan kelembagaan pesantren. Kajian yang senada juga dilakukan oleh Azra (2004) dengan fokusnya pada peran dakwah kiai sebagai motor bagi gerakan sosial dan transmisi intelektual para kiai di Nusantara dengan para ulama di Timur Tengah.



Sudut kajian peran dakwah kiai dalam mentransformasikan faham keagamaan Islam dilakukan oleh Haidar (1994). Transformasi faham keagamaan dengan melakukan kajian fiqh sebagai dasar bagi pegangan masyarakat menghadapi perubahan sosial. Haidar telah mengkaji NU yang dipimpin oleh para kiai dari sisi fiqh politik. Ia menyimpulkan bahwa rujukan para kiai dalam menentukan rujukan politiknya adalah tradisi keilmuan yang berhaluan Aswaja. Faham ini memiliki tiga pondasi cakupan ilmu meliputi: *aqidah-tauhid* sebagai aspek keimanan, *syariat-fiqh* sebagai aspek amaliyah sehari-hari, dan *akhlak-tasawuf* sebagai aspek estetika dalam beramalillah. Namun Haidar menegaskan bahwa kecenderungan rujukan kiai lebih banyak pada aspek fiqh.

Sejenis dengan kajian Haidar adalah Djamil (2001). Kajian Jamil melakukan penelitian terhadap sebuah gerakan yang dilakukan oleh Kiai Rifai dari desa Kalisasak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang berupa gerakan *tarajumah*, yakni gerakan pemahaman tentang tradisi keislaman dengan menterjemahkan berbagai kitab-kitab klasik agar memberikan kesadaran dan semangat kepada santri dan masyarakat Islam. Kiai Rifai adalah seorang kiai yang dilahirkan di Kendal Jawa Tengah pada tahun 1786. Ayahnya adalah seorang kiai penghulu atau pejabat agama di zaman colonial Belanda. Sebelum menetap di Kalisasak, belajar ke Makkah selama delapan tahun (1833-1841). Melalui gerakannya, Kiai Rifai memberikan sumbangan besar terhadap terciptanya pemikiran Islam tradisional *Ahlusunnah wal Jamaah* di Indonesia. Akan tetapi ajarannya sering bersentuhan dengan gerakan isolasi secara kultural terhadap kebudayaan kota melalui bahasa agama yang sarat dengan provokasi anti pemerintah Belanda dan juga anti kepada tokoh-tokoh agama yang dekat dengan kekuasaan Belanda.

### Kiai Sebagai Patron

Kajian berikutnya tentang peran dakwah kiai dalam menciptakan patronase yang kuat di lingkungan masyarakat. Kajian ini dilakukan oleh Saxeboel (2002) dengan latar belakang masyarakat Madura. Dia melihat bahwa kelompok pemimpin agama Islam, para kiai, memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang Madura. Secara kolektif terlihat, para kiai memiliki kekuatan besar. Dalam disertasi nya mengungkapkan sifat kiai sebagai pemegang kekuasaan. Kiai Madura dapat digambarkan sebagai pelindung. Teori hubungan patron-klien telah membantunya menggambarkan sifat kekuatan kiai. Dia menganalisis cara-cara paling dominan di mana para kiai Madura mengembangkan hubungan patron-klien.

Tiga pertanyaan umum yang memandu analisisnya didasarkan pada teori Scott (1972) dan Jackson (1974). Tiga pertanyaan tersebut berdasarkan penelitian empiris sebelumnya tentang Madura dan diperkuat oleh penelitian lapangannya sendiri, ditemukan cara yang paling dominan di mana para kiai Madura mengembangkan hubungan patron-klien dengan memanfaatkan: pertama, hubungan sosial yang saling terkait; kedua, keterlibatan dalam organisasi; ketiga, keterlibatan dalam ekonomi (Saxeboel 2002:104).

Tema yang sama tentang patronase yang menjadikan kekuasaan kiai terus bertahan meskipun harus melakukan persaingan antar kiai pada peran dakwah politik dibahas oleh Turmudi (2003). Ada dua lembaga formal yang dijadikan kiai sebagai basis dalam membangun hubungan kuasanya dengan masyarakat. Dua lembaga tersebut adalah pesantren dan tarekat. Dominannya peran dakwah kiai dalam kelembagaan pesantren dan tarekat menempatkan kiai pada posisi yang terhormat dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat Jombang telah lama dibentuk dengan kehadiran pesantren. Meskipun demikian hubungan kuasa kiai dengan masyarakat masih lebih kuat dengan masuk dalam lingkungan tarekat (Turmudi 2003:315).

Namun, masing-masing kiai sebagai pemimpin Islam tradisional, bersifat independen satu sama lain. Karena itu kecenderungan menjadi kreator politik seringkali memunculkan pandangan yang

berbeda antar kiai yang tidak jarang melahirkan konflik-konflik diantara para pengikutnya. Konflik ini, yang biasanya tidak masuk kepada ranah ideologis adalah gambaran dari ketegangan pribadi antar kiai sebagai pemimpin pesantren ataupun tarekat (Turmudi 2003:317).

### Kiai Sebagai *Decision Maker*

Temuan lain menyatakan kiai sebagai sebuah intitusi, mencoba untuk membangun sebuah tatanan sosial yang ada sesuai dengan cita-cita Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan kiai akan tugasnya sebagai *kholifah fil ardl* yang harus mengemban amanah untuk memakmurkan bumi dan harus mewujudkan bangunan nilai-nilai keislaman dalam setiap peri kehidupan. Keberhasilan kiai dalam mebangun tatanan yang islami tidak lepas dari kenyataan bahwa kepemimpinan kiai berbeda dengan kepemimpinan formal maupun informal lain di Indonesia. Dengan pola kepemimpinan kharismatik, kiai membentuk hubungan yang erat dengan para pengikutnya, situasi yang tidak bisa diciptakan oleh pemimpin lain. Khususnya hubungan dalam tarekat dimana subordinasi klien sangat penting (Turmudi 2003:318).

Meskipun demikian, telah terjadi perubahan pola patronase pada kepemimpinan kiai akibat dari berkembangnya pola pendidikan modern. Akibat dari ini adalah kemunculan profanisasi kharisma, yaitu berkurangnya pengaruh kiai dalam masyarakat. Namun hal ini tidak terjadi dengan satu kali peristiwa besar. Kenyataanya selalu diikuti dengan pola perubahan yang perlahan-lahan biasanya diawali dari golongan muda (Turmudi 2003:320).

Masih dalam kajian kekuasaan-politik dilakukan juga oleh Fealy (2003). Kajiannya meneliti tentang pemikiran dan gerak para kiai NU di tahun 1952-1967 dimana posisi NU saat itu atas inisiasi para kiai menjadi sebuah partai politik. Para kiai membentuk perilaku politik NU campuran antara akomodatif dan militan, bergantung pada kondisi yang dibutuhkan, meskipun lebih banyak kecenderungan untuk menciptakan kreasi yang akomodatif. Banyak akademisi saat itu yang memberikan cap pada NU dan kiaiinya sebagai oportunistik. Cap ini ingin menampilkan sebuah tuduhan (meski tidak diungkapkan secara langsung) bahwa para kiai NU tidak pernah memiliki prinsip atau tidak memegang prinsip. Para pengkritik menunjuk pada seringnya partai NU mengubah sikap politiknya demi menyelamatkan posisinya di pemerintahan. Sebagai contohnya, NU telah menyatakan komitmennya untuk membangun solidaritas partai Islam, namun partai NU justru berungkali membangun aliansi dengan partai nasionalis untuk melawan Masyumi (Fealy 2003:347-348).

Alasan dari pengambilan keputusan para kiai NU ini adalah sebagai bentuk mengkreasikan prinsip dasar ideologi keagamaan yang sudah lama dianutnya. Ini menyatakan bahwa para kiai NU bukan tidak berprinsip, tapi prinsip itu bergerak mengikuti terhadap perkembangan situasi, dimana situasi selalu ditempatkan pada posisi yang mendahulukan *maslahat* (manfaat) dari *mafsadat* (kerusakan), *amar ma'ruf nahi mungkar*, dan *akhofud darorain* (memilih keburukan—diantara keburukan—yang paling ringan dampak kerusakannya) (Fealy 2003:348).

### Dinamika Dakwah Kiai dalam Perubahan Sosial Kekuasaan

Kreasi kiai lainnya adalah menciptakan hubungan yang mendasarkan pada *power sharing* dengan *strongman* (orang kuat dalam sebuah daerah). Ashari (2003) dan Rozaki (2004) tampil sebagai peneliti yang memfokuskan kajiannya pada *power sharing* antara kiai dan bajingan di Pamekasan; dan kiai dan blater di Madura. Sebagai dua kekuatan sosial yang sangat mengakar secara kultural di masyarakat Madura, eksistensi kiai dan blater sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dua kekuatan sosial ini dengan caranya masing-masing membangun relasi kuasa atas masyarakat (Rozaki 2004:189).

Dalam konteks membangun relasi kuasa ini, tentunya keduanya sama-sama menyadari posisinya sebagai *strongman*. Dalam konteks ini pula relasi kekuasaan antara kiai dan blater tak terelakkan dan menjadi fakta sosiologis. Bila dilihat dari motif dan konteks relasi sosio-kulturnya dapat dijelaskan, bahwa relasi kuasa antara kiai dan blater didasari motif sosial-ekonomi-politik. Motif ekonomi politik yang dilakukan oleh kiai dengan blater biasanya dilakukan oleh kiai yang kesadaran dan visi keagamaannya sudah mengalami profanisasi. Arena yang seringkali dijadikan pertemuan relasi ini adalah pemilihan *klebun* dan bupati (Rozaki 2004:192-194).

Kekuatan politik kiai dipandangan pada waktunya juga mengalami kebuntuan. Martin van Bruinessen and Farid Wajidi (2006) mencatat, ketika awal berkuasanya orde baru, para kiai menemukan kebuntuan untuk memperoleh dukungan massa. Di kemudian waktu kebuntuan tersebut dapat dipecahkan dengan sebuah gagasan dukungan massa yang diberi nama *syu'un ijtimai'iyah*. Gagasan semacam ini lebih dekat untuk menggaungkan kiai sebagai simbol bagi kekuatan *civil society*, yang mana kehadiran kiai muncul sebagai simbol bagi kekuatan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat dengan konotasi agraris. Dengan demikian, kiai lebih dirasakan kehadirannya oleh masyarakat lebih dari hanya sekedar *vote getter*. Peran dakwah kiai sebagai kekuatan *civil society* berkembang menjadi gagasan-gagasan yang cukup signifikan dalam mempengaruhi cara masyarakat memaknai praktik keberagamaan Islam. Munculnya wacana tentang Islam Emansipatoris, Islam Transformatif dan Islam Progresif berdampak pada pengaruh yang begitu signifikan terutama di kalangan akademisi dan intelektual muda (Said Ali, 2008).

Kajian yang serupa tampil dalam mengembangkan penelitian yang mengarah pada peran dakwah kiai dalam menciptakan kultur damai dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan kajian ini ikut meramaikan gaung dari wacana tentang *civil society*. Cendekiawan yang membahas terkait ini adalah Soleh (2007). Risetnya pada lima provinsi di Indonesia menunjukkan keseriusan para kiai dalam mendukung perdamaian, resolusi konflik dan penjagaan atas kehidupan pluralitas dalam perbedaan etnis dan agama. Beberapa kiai yang ditampilkan oleh soleh diantaranya adalah: Kiai Farid Wajedy, Pengasuh Pesantren DDI Mongkoso yang menolak bentuk jihad yang dilakukan dengan kekerasan. Begitu juga yang ditampilkan oleh Kiai Fawaid dari Situbondo dan Kiai Turmuzi Badrudin dari NTB. Ada juga tulisan dari (Harun, 2007) mengangkat sosok kiai Mahfudz Ridwan yang memiliki inisiatif mendirikan pesantren pluralisme bernama Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Bandung, Salatiga Jawa Tengah. Terakhir adalah kajiannya (Baso, 2007) yang menampilkan kultur damai kiai-kiai pada pesantren yang ada di Bugis, Makassar.

Patoni (2007) menunjukkan bahwa peran dakwah kiai semakin meluas tidak hanya dalam bidang sosial, pendidikan dan budaya, tapi meluas pada wilayah politik praktis sebagai bagian dari kiprahnya untuk untuk memberdayakan masyarakat dan memperjuangkan ajaran agama Islam. Patoni menggambarkan dalam penelitiannya semakin meluasnya peran dakwah kiai dalam politik praktis; menjadi aktor politik, terlibat dalam dukungan politik, dan partisipasi dalam hal memberikan restu adalah didasarkan pada alasan untuk memperjuangkan agama Islam melalui jalur struktural sekaligus didasari moralitas politik yang wajib diperjuangkan. Politik dalam pandangan kiai adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam.

Bagi Martin Van Bruinessen (2012) peran dakwah yang dilakukan kiai adalah melakukan transformasi faham keagamaan dan sosial melalui kitab kuning, pesantren dan tarekat. Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia adalah tarekat yang menjadi acuan paham keagamaan para kiai. Ia menjeaskan bahwa Islam pertama kali di kenal orang Indonesia adala Islam yang bernuansa tasawuf dan tarekat. Disini tarekat tidak hanya berfungsi sebagai sebagai penguatan keagamaan, tetapi berfungsi juga sebagai lembaga kekeluargaan besar.

Burhanudin (2012) melanjutkan penelitian dari Azra (2004) yang menekankan peran dakwah kiai sebagai motor bagi gerakan sosial dan jaringan intelektual sampai ke Timur Tengah sampai kepada membentuk kelembagaan kiai, seperti NU, sekaligus mencipta otoritas ditengah masyarakat Muslim Indonesia. Studinya memberikan penjelasan historis tentang apa yang saat ini muncul sebagai suatu bahasa konseptual tentang ulama atau kiai kontemporer: revitalisasi dan reformulasi tradisi dalam rangka beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan baru modernitas. Gagasan-gagasan intelektual Islam adalah sebagai sesuatu berasal dari individu-individu yang kreatif (ulama atau kiai), yang berkontribusi dalam pembentukan religiusitas umat Islam dalam sejarah Indonesia dan pada gilirannya menciptakan otoritas di tengah-tengah Muslim Indonesia (Burhanudin 2012:6-9).

Sementara itu Azizah (2013) mengambil penelitian peran dakwah kiai dalam politik praktis. Studinya mengangkat sosok dua kiai, di Sampang dan Pamekasan Madura yang tampil menjadi Bupati. Kiai yang sekaligus bupati telah berhasil melakukan transformasi sosial, budaya dan politik. Secara sosial, mereka merupakan tokoh masyarakat yang secara tradisional menjadi referensi masyarakat dengan pengalamannya pada organisasi sosial keagamaan dan politik telah menjadi sosok yang tidak saja dikenal dan terkenal oleh masyarakat lokal desa, tetapi juga regional. Dengan bekal ilmu agamanya yang baik tidak hanya menempatkan dirinya sebagai pusat rujukan sosial dan agama bagi masyarakat di daerahnya, namun juga semakin luas pengaruhnya, terutama setelah mereka menempuh studi lanjut pada program pascasarjana. Meningkatnya kemampuan akademis ini, secara budaya, telah melengkapi kiprahnya tidak hanya di bidang sosial keagamaan, melainkan juga tokoh politik di tingkat kabupaten. Secara politik, kedua kiai tersebut telah menjadi anggota partai politik dan berpengalaman di legislatif sehingga kemampuan empatinya cukup tinggi untuk menjadi bupati (Azizah 2013:264).

Studi tentang pertarungan kiai, *blater* dan *klebun* dalam memperebutkan kekuasaan di arena politik lokal dibahas oleh Pribadi (2015) . Terkadang tiga elit desa tersebut menjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka mempertahankan atau memperluas pengaruh kekuasaan. Dengan mengeksplorasi sumber-sumber otoritas, karakteristik, dunia sosiopolitik, peran dakwah dan hubungan antara para pemimpin desa, Pribadi menunjukkan bahwa hanya ada beberapa perubahan dalam politik lokal di Madura, sejak reformasi politik 1998. Faktanya, terlepas dari proses reformasi yang berkesinambungan, keadaan politik lokal di daerah itu tetap relatif sama dan bahkan terjadi kontinuitas. Di sana, politik lokal telah menjadi arena khas para pemimpin lokal: *klebun* (kepala desa), kiai (pemimpin agama) dan *blater* (orang kuat lokal). Perjuangan untuk mendapatkan pengaruh dari para elit desa ini tidak hanya berpusat pada peluang untuk keuntungan materi pribadi, tetapi juga pada persaingan politik, yang terorganisir secara longgar, pragmatis, dan sering bersifat saling menguntungkan. Kehadiran elit desa yang terus-menerus ini pada periode pasca-Suharto tanpa diragukan merupakan refleksi dan konsekuensi dari pengaruh langsung mereka terhadap masyarakat.

Studi Hidayat (2017) berbicara tentang bagaimana seorang kiai memainkan berbagai peran dakwah dominan yang tumpang tindih (*polymorphic*) termasuk guru agama, panduan orang, pemimpin komunitas, guru spiritual dan referensi moral. Juga Masud (2004) secara luas diketahui bahwa seorang kyai diminta sebagai penasihat politik oleh penguasa lokal atau nasional. Seorang kyai hebat dari Jawa Timur, Hasyim Asy'Ari, sangat dihormati karena menjadi ulama besar (*hadrath asy-Syaikh*). Dalam sistem tradisional sekolah Islam (*pesantren*), kyai tidak dapat dipertanyakan dan ditantang oleh santri mereka, dan menuntut kesetiaan penuh dan mendalam. Seorang Muslim biasa akan sangat mungkin dan diharapkan untuk menunjukkan rasa hormat dan tunduk pada kyai. Selain itu kiai menjadi istilah yang dominan pada maskulinitas yang terwujud dari praktik gerakan kiai dalam membangun jaringan intelektual yang memiliki kecenderungan lebih dominan pada laki-laki (Hidayat 2017:1-7).

Yanwar Pribadi (2018) mengembangkan kajiannya terkait dengan pembentukan politik identitas santri yang digawangi oleh kiai. Peran dakwah kiai Madura sebagai pemimpin tradisional dan modern, merupakan pendukung utama budaya santri. Telah lama peran dakwah kiai membentuk dan

mengkarakterisasi dinamika Islam dan politik di Madura dan telah lama memanfaatkan posisi mereka untuk meningkatkan kedudukan sosial dan kesejahteraan politik mereka dalam hubungan negara-masyarakat. Dengan melihat politik identitas, Pribadi menekankan proses kekuasaan, aliansi, kompetisi, akomodasi, negosiasi, dan klaim yang dibuat kiai untuk mendapatkan atau menegaskan kembali kekuasaan.

Kiai bersama pesantren dan jaringan organisasi, seperti NU, sangat waspada menanggapi kekuasaan negara dengan membangun hubungan yang beragam dengan negara. Hubungan ini seputar mengambil jarak dari pemerintah untuk membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan negara ketika kekuatan negara menjadi terlalu kuat untuk ditentang, atau ketika membuat aliansi dengan pemerintah memunculkan sisi manfaat. Tentu saja, kiai telah menjadi calo sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Madura. Ini sejalan dengan proposisi Salwa Ismail pada kiai di Madura bahwa secara historis kiai memainkan peran dakwah sebagai penasihat, dan keterlibatan mereka dalam politik dan perebutan kekuasaan dibentuk oleh posisi mereka dalam hierarki sosial dan politik pada waktu itu (Pribadi 2018:60). Hal yang pokok dalam kajiannya adalah para pemimpin lokal selalu ada dalam proses transformasi di Madura dan pada kenyataannya, mereka telah berhasil mempertahankan posisi mereka yang dihormati dan telah melakukan dominasi atas penggunaan otoritas keagamaan yang sah oleh kiai, penggunaan kekuatan fisik oleh *blater*, dan kepemimpinan formal oleh *klebun*, di dalam suatu wilayah tertentu. Proses sosial, politik, ekonomi, dan budaya ditentukan oleh bagaimana aktor-aktor lokal memediasi dan merespon perubahan institusi formal. Mereka bisa saling berebut pengaruh atau memilih untuk berkolaborasi (Pribadi 2018:251).

### Kiai Sebagai Influencer di Era Digital

Saat ini, pada era perubahan sosial yang distimulasi oleh arus teknologi digital, tidak luput dari peran dakwah kiai dalam menghadapi arus perubahan ini. Berbagai macam kreasi yang dimunculkan oleh kiai mendapatkan sorotan dari berbagai peneliti. Pesantren misalnya, sebagai basis kekuatan kiai dalam menyebarkan misi dakwahnya, telah menyesuaikan dengan berbagai macam teknologi digital dalam mengembangkan dakwahnya (Haris, 2023; Ulum & Munim, 2019), kurikulum pendidikannya (Husna 2021; Hasmiza dan Muhtarom 2022; Syafi'AS dan Najib 2022; Masruroh dan Muhid 2022), pengembangan keterampilan santrinya dan strategi dakwahnya (Kholis, 2021; Setiawan, 2022; Syahputra, 2020; Ummah, 2020). Hal ini tentunya dilakukan dengan tanpa menggerus tradisi dan nilai yang menjadi prinsip dalam melakukan dakwah.

Kiai juga menjadi *influencer* dalam berbagai momentum yang menjadi kegemaran anak muda, terutama gen-Ze. Kiai Bahak misalnya, adalah sosok kiai yang menjadi sorotan di dekade tahun ini baik sebagai kajian penelitian maupun sebagai sosok yang banyak memiliki konten di media sosial dengan jutaan penonton (Rusydiyah, Sa'diyah, dan Azizah 2020). Konten-konten tersebut menghasilkan perubahan pemikiran, sikap dan tingkah laku tidak hanya bagi penonton yang segenerasi dengan Kiai Bahak, namun juga banyak dari kalangan muda milenial (Syarifah 2020; Qordofa dan As'ad 2022).

### Kesimpulan

Perubahan sosial di masyarakat sebagai kondisi tak terelakkan, tidak luput dari peran dakwah kiai dengan segala aspek dinamikanya. Penelitian ini mengemukakan beberapa hasil analisis yang didapatkan dengan mengkaji dari penelitian para cendekiawan terdahulu. Diantara hasilnya sebagai berikut: *Pertama*, Terminologi *cultural broker* yang disematkan oleh Geertz pada kiai terbantahkan dengan sejumlah hasil penelitian yang membuktikan kiai lebih sebagai *creator* dalam menghadapi dinamika perubahan sosial. *Kedua*, kiai juga telah melakukan modernisasi tradisi dalam berbagai aspek

dimensi tradisi pesantren dan tradisi lokal dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip dalam menjalankan dakwah Islam di masyarakat. *Ketiga*, politik dan pemberdayaan masyarakat yang diperankan oleh kiai di tengah perubahan sosial adalah bagaian dari melaksanakan tugas *kholifah fil ardl* untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin* dan kemaslahatan umat. *Keempat*, kiai melakukan transformasi pemikiran dalam rangka mengajak umat untuk menjadi masyarakat yang moderat dengan berpijak pada prinsip keislaman. *Kelima*, kiai sebagai patron memiliki andil yang kuat dalam rangka membimbing umat agar terhindar dari dampak negatif dari arus perubahan sosial. *Keenam*, kiai sebagai *decision maker* mewujudkan dalam berbagai perhelatan yang merumuskan berbagai prinsip penguatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat, serta penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. *Ketujuh*, dinamika dakwah kiai dalam perubahan sosial kekuasaan mengungkap fleksibilitas peran dakwah kiai ketika berhadapan dengan kekuasaan lainnya, sehingga kiai mampu tetap menjaga peran dakwahnya sebagai *creator* berhadapan dengan kekuasaan lain. *Kedelapan*, kiai mampu memrankan sebagai *influncer* yang mencerdaskan umat di era digital dengan penerimaan pada semua kalangan tua maupun generasi milenial.

## Daftar Pustaka

- Ashari, L. (2003). Power Sharing Between the Kyai, Bajingan and the Village Head. In Mimeo. Jakarta.
- Azizah, N. (2013). *Artikulasi Politik Santri Dari Kiai Menjadi Bupati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Baso, A. (2007). Pesantren dan Kultur Damai. In B. Soleh (Ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Bruinessen, M. Van. (2012). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Bruinessen, M. Van, & Wajdi, F. (2006). Syu ' un Ijtima ' iyah and the Kiai Rakyat : Traditionalist Islam , Civil Society and Social Concerns. *Indonesian Transition*, 205–248.
- Buresh, S. A. (2002). *Pesantren-based development: Islam, education, and economic development in Indonesia*. PhD thesis: University of Virginia.
- Burhanudin, J. (2012). *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: NouraBooks.
- Dhofier, Z. (1980). *The Role of The Kiai in The Maintenance of Traditional Islam in Java*. Canberra: The Australian National University.
- Dirdjosanjoto, P. (1999). *Memelihara Umat; Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKIS.
- Djamil, A. (2001). *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisasak*. Yogyakarta: LKIS.
- Fealy, G. (2003). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKIS.
- Geertz, C. (1960). The Javanese Kijaji : The Changing Role of a Cultural Broker. *Comparative Studies in Society and History*, 2(2), 228–249.
- Haidar, A. (1994). *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hall, Stuart and Held, D. (1989). Citizens and Citizenship. In M. Hall, Stuart and Jacques (Ed.), *New Times: The Changing Face of Politics in the 1990s*. London: Verso.
- Haris, M. A. (2023). Urgensi Digitalisasi Pendidikan Pesantren di Era Society 5.0 (Peluang dan Tantangannya di Pondok Pesantren Al-Amin Indramayu). *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(01), 49–64.
- Harun, M. B. (2007). Pesantren dan Pluralisme. In B. Soleh (Ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*.

- Jakarta: LP3ES.
- Hasmiza, H., & Muhtarom, A. (2022). Kiai dan Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Digitalisasi. *Arfannur*, 3(3), 137–150.
- Hidayat, R. (2017). *Santri , Kyai , and Ulama : Framing Masculinities within Indonesian Religious Elites*. (August 2011), 0–14.
- Horikoshi, H. (1987). *Kyai dan Perubahan sosial*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Husna, L. A. (2021). Digitalisasi Pembelajaran Sejarah Pada Pesantren Era New Normal. *Jurnal Pendidikan Dompét Dhuafa*, 11(01), 27–33.
- Isma'il, I. Q. (1997). *Kiai penghulu Jawa: peranannya di masa kolonial*. Jakarta: Gema Insani.
- Jackson, E., & Parker, L. (2008). modernisation , Islamisation and the future of Islamic education in Indonesia. *Religion*, 42(1), 21–53.
- Jackson, K. D. (1990). *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kholis, N. (2021). Dakwah virtual, generasi Z dan moderasi beragama. *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, 1(02), 155–168.
- Kinser, S. (1981). Annaliste Paradigm? The Geohistorical Structuralism of Fernand Braudel. *The American Historical Review*, 86(1), 63. <https://doi.org/10.2307/1872933>
- Lukens-bull, R. A. (2000). Teaching Morality : Javanese Islamic Education in a Globalizing Era. In *Journal of Arabic and Islamic Studies* (Vol. 3). <https://doi.org/10.1525/aeq.2001.32.3.350>
- Mansurnoor, I. (1990). *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Mansurnoor, I. A. (1995). Rato and Kiai in Madura. Are they Twins. In et al. in Dijk, Kees van (Ed.), *Across Madura Strait. The Dynamics of an Insular Society*. Leiden: KITLV Press.
- Mas'ud, A. (2004). *Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKIS.
- Mas'ud, A. (2006). *Dari Haramain Ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Prenada.
- Masruroh, S. A., & Muhid, A. (2022). Migrasi Pengajian Konvensional ke Pengajian Virtual di Pesantren. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(01), 108–129.
- Patoni, A. (2007). *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pribadi, Y. (2015). The klebun, the kiai and the blater: Notes from western Madura, Indonesia1. *South East Asia Research*, 23(3), 303–317. <https://doi.org/10.5367/sear.2015.0267>
- Pribadi, Y. (2018). *Islam, state and society in Indonesia : local politics in Madura*. New York: Routledge.
- Qordofa, M. Q., & As' ad, M. (2022). Metode Dakwah KH. Ahmad Baha'uddin Nursalim (Gus Baha) Melalui Channel Santri Gayeng Di Media Youtube. *Syar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 1–10.
- Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political , Social , Cultural , and Religious History , c. 1930 to the Present*. Singapore: NUS Press.
- Rozaki, A. (2004). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: kiprah kiai dan blater sebagai rezim kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Rusdiyah, E. F., Sa'diyah, H., & Azizah, M. (2020). The millennial Kiai: contemporary Indonesian dakwah activism through social media. *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 15(1), 75–97.
- Said Ali, A. (2008). *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*. Jakarta: LP3ES.
- Saxeboel, T. (2002). *The Madurese ulama as patrons*. (May).
- Setiawan, N. (2022). Urgensi Dan Strategi Dakwah Santri di Era Digitalisasi. *Jurnal Dakwah Dan*

- Komunikasi*, 7(2), 223–232.
- Soleh, B. (2007). Antara Konflik dan Perdamaian: Peran Pesantren. In B. Soleh (Ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Suprpto, R. (1997). *Status dan Peran Elit Agama dalam Proses Pembangunan Desa Sesudah Diundangkannya UU Nomor 5/1979*. Universitas Airlangga.
- Syafi'AS, A., & Najib, A. (2022). Strategi Pembelajaran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Menghadapi Era Digitalisasi. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 313–337.
- Syahputra, M. C. (2020). Jihad santri millennial melawan radikalisme di era digital: Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara di media sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 69–80.
- Syarifah, N. L. A. (2020). *Tafsir Audiovisual: Kajian Penafsiran Gus Baha di Channel YouTube Al-Muhibbiin dan Implikasinya bagi Pemirsa*.
- Touwen-Bouwsma, E. (1992). The Ulama of Madura: Rise and Expansion of a Religious Regime. In M. Bax & A. Kloos, Peter, and Koster (Eds.), *Faith and Polity on Religion and Politics*. Amsterdam: VU University Press.
- Turmudi, E. (2003). *Struggling for the Umma : Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. Canberra ACT 0200, Australia: ANU E Press.
- Ulum, M., & Munim, A. (2019). Digitalisasi Pendidikan Pesantren (Paradigma Dan Tantangan Dalam Menjaga Kultur Pesantren). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 664–670.
- Ummah, A. H. (2020). Dakwah digital dan generasi milenial (menelisik strategi dakwah komunitas arus informasi santri nusantara). *Tasâmuh*, 18(1), 54–78.
- Wahid, A. (1974). Pesantren Sebagai Subkultur. In D. Raharjo (Ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Ziemek, M. (1983). *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.